

ANALISIS KINERJA PENGAWASAN PADA PEMILIHAN UMUM 2019 (STUDI KASUS BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA TIMUR)

Tri Bagus Sudibyo Pujiono¹, Rachmawati Novaria², Kendry Widiyanto³

^{1, 2, 3} Administrasi Negara, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

tribagussudibyo@gmail.com¹, nova@untag-sby.ac.id², kenranggo@untag-sby.ac.id³

Abstrac

In the current research, researchers want to know how the Effectiveness of General Election Supervision in Improving Performance at the East Java Provincial Election Supervisory Agency in the 2019 General Election. In this study, qualitative analysis techniques, namely with a research system that is explaining, managing, describing and interpreting the results of the research, are techniques for processing and presenting the data carried out. As an answer to the formulation of this problem, the characteristics, character, and description of conditions and phenomena in the interpretation of the results of research that has been carried out. As for data collection techniques, namely in the form of observation, interviews, and documentation. The result obtained from this study is that the performance accountability of Bawaslu can be said to be quite good. This can be proven by an increase in the handling of violation cases, a decrease in the number of suspected violation cases, transparency in the implementation of elections, and supporting public participation in case reporting so that the general elections run smoothly enough.

Keywords : Effectiveness, Performance, Supervision

Abstrak

Pada penelitian yang dilakukan saat ini peneliti ingin mengetahui bagaimana Efektivitas Pengawasan Pemilihan Umum dalam Meningkatkan Kinerja pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur pada Pemilihan Umum 2019. Dalam penelitian ini, teknik analisis kualitatif yaitu dengan tata penelitian yang bersifat menjelaskan, mengelola, menggambarkan serta melakukan pernafisiran dari hasil penelitian merupakan teknik pengolahan dan penyajian data yang dilakukan. Sebagai sebuah jawaban atas rumusan permasalahan ini maka ciri, karakter, maupun gambaran mengenai kondisi serta fenomena dalam tafsiran dari hasil penelitian yang telah dilakukan. Sedangkan untuk teknik pengumpulan data yakni berupa observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah akuntabilitas kinerja dari Bawaslu dapat dikatakan cukup baik. Hal ini dapat dibuktikan dengan adanya peningkatan dalam penanganan kasus pelanggaran, penurunan jumlah dugaan kasus pelanggaran, transparansi dalam pelaksanaan pemilihan umum, serta mendukung partisipasi masyarakat dalam pelaporan kasus sehingga pemilihan umum cukup berjalan dengan lancar.

Kata Kunci : Efektivitas, Kinerja, Pengawasan

Pendahuluan

Negara Indonesia merupakan negara demokrasi dengan kedaulatan penuh berada ditangan rakyatnya, ini sesuai dengan ideologi pancasila yang berada pada sila keempat.

Demokrasi bisa diartikan dimana semua warga negaranya memiliki hak yang sama untuk pengambilan keputusan yang dapat mengubah hidup warga negaranya. Demokrasi mengizinkan warga negara dalam ikut serta baik secara langsung atau melalui perwakilan dalam perumusan, pengembangan, dan pembuatan hukum. Pemilihan umum di Indonesia telah dilaksanakan secara demokratis dengan cara pemilihan langsung oleh rakyat terhadap wakil-wakilnya baik dalam lembaga eksekutif maupun lembaga legislatif. ciri yang mendasar dari suatu negara demokrasi yakni keberadaan Pemilihan Umum (Pemilu).

Meskipun Pemilu bukanlah satu-satunya aspek dalam demokrasi, tetapi menjadi bagian yang sangat penting, karena Pemilihan Umum berperan sebagai mekanisme perubahan politik mengenai pola dan arah kebijakan publik.

Kelembagaan pengawas Pemilu dikuatkan melalui Undang-Undang Penyelenggara Pemilu dengan dibentuknya sebuah lembaga tetap yang dinamakan Bawaslu (Badan Pengawas Pemilihan Umum). Kewenangan utama dari Bawaslu (Badan Pengawas Pemilihan Umum) adalah untuk mengawasi pelaksanaan tahapan Pemilu, menerima pengaduan dan menangani kasus-kasus pelanggaran administrasi, pelanggaran pidana pemilu, serta kode etik dalam pelayanan publik.

Pengawasan terhadap proses pemilu dilembagakan dengan adanya Badan Pengawas Pemilu. Pengawasan terhadap penyelenggaraan pemilu merupakan suatu kehendak yang didasari demi tercapainya pemilu yang berkualitas. Kontribusi yang utama pengawasan pemilu, disamping untuk mendorong terwujudnya pelaksanaan pemilu yang berkualitas secara teknis, juga merupakan bagian yang penting bagi berlanjutnya demokratisasi di Indonesia. Pengawasan merupakan keharusan, bahkan terdapat elemen yang melekat kuat pada tiap-tiap pemilu. Kegiatan pengawasan merupakan salah satu dari beberapa elemen dalam pelaksanaan kegiatan pemilihan umum agar dapat berjalan dengan jujur dan adil.

Berdasarkan fakta diatas penulis tertarik untuk melakukan penelitian di Bawaslu Provinsi Jawa Timur dengan judul “Efektivitas Pengawasan Pemilu Dalam Meningkatkan Kinerja Pada Bawaslu Provinsi Jawa Timur” dengan pokok rumusan masalah yaitu bagaimana Efektivitas kinerja pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Provinsi Jawa Timur dalam setiap tahapan pemilu tahun 2019. Dari rumusan masalah ini, diharapkan akan dapat diketahui apakah fungsi bawaslu dalam pelaksanaan pemilu tahun 2019 bisa dikatakan efektif, kurang efektif atau tidak efektif.

Metode Penelitian

Jenis penelitian menggunakan penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif, penelitian kualitatif merupakan penelitian berdasarkan pada kondisi alamiah bahwa penelitian sebagai kunci dalam instrumen dengan menggunakan pengumpulan data yang memungkinkan peneliti dapat mengkaji secara mendalam dan terperinci.

Dalam penelitian ini menggunakan dua sumber data yaitu data Primer, yaitu berbagai informasi dan keterangan yang diperoleh langsung dari sumbernya tidak melalui orang ketiga ataupun dengan perantara. Data sekunder, merupakan peneliti yang diperoleh dari teori, informasi secara tidak langsung dari sumber seperti website, jurnal, penelitian terdahulu, buku dan dokumen.Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara, dokumentasi.

Hasil dan Pembahasan

Kuantitas Pengawasan Badan Pengawas Pemilu Terhadap Berjalannya Pemilihan Umum

Berdasarkan wawancara, Capaian kinerja tahun 2019 sudah tercapai dengan maksimal dengan dibuktikanya melalui beberapa capaian yang telah dicapai Bawaslu seperti adanya peningkatan penindakan kasus sengketa, penurunan kasus pelanggaran serta peningkatan layanan pelaporan yang telah dilakukan oleh *stakeholder* ataupun masyarakat. Hal ini dibuktikan oleh keterangan dari narasumber mengenai penurunan sekitar 7% kasus pelanggaran. Selain itu juga, untuk layanan laporan serta temuan pelanggaran yang terjadi juga kami tangani. Kedua aspek tersebut dapat dikatakan kalau pengawasan bawaslu ini memiliki capaian yang cukup bagus pada pemilihan umum tahun 2019.

Kualitas Pengawasan Badan Pengawas Pemilu Terhadap Berjalannya Pemilihan Umum

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan dapat dicapai kesimpulan yaitu untuk jenis kasus pelanggaran paling banyak yaitu pelanggaran yang lebih ke pelanggaran administrasi seperti prosedur registrasi, serta mekanisme berjalannya pemilihan umum. Sedangkan untuk kasus temuan pelanggaran mengenai sebaran kasus di Jawa Timur totalnya sekitar 10 kasus, namun hal itu sudah mengalami penurunan dikarenakan pada pemilu 2014 sekitar belasan ribu kasus pelanggaran dengan sebaran kasus beragam, baik administrasi, pidana, kode etik dan juga pelanggaran hukum lain. Selain itu, untuk presentase kasus pelanggaran terendah adalah dugaan tindak pidana.

Berdasarkan hal tersebut maka dapat ditarik kesimpulan bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur berhasil untuk mengawasi jalanya pemilihan umum 2019 dalam hal penurunan dugaan kasus pelanggaran.

Efektivitas Waktu Pengawasan Badan Pengawas Pemilu terhadap Berjalannya Pemilihan Umum 2019

Estimasi banyaknya waktu yang digunakan dalam pemilihan umum 2019 memiliki waktu yang lebih lama dari pada pemilihan umum pada tahun-tahun sebelumnya yaitu sekitar 20 jam. Namun pada pemilihan umum 2019 membutuhkan waktu sekitar 31 jam. Badan Pengawas Pemilihan umum mengakui adanya *overtime* dikarenakan banyaknya surat suara yang dilakukan perhitungan selain itu untuk waktu daripemilihan umum 2019 sangat berbeda jauh dengan waktu yang digunakan pada pemilihan umum pada tahun-tahun sebelumnya. menurut salah satu petugas KPPS yang bertugas di salah satu TPS Surabaya memaparkan bahwa kurangnya waktu serta padatnya waktu pemilihan umum serentak mulai dari persiapan tempat pemilihan umum, pemungutan serta perhitungan suara yang menyebabkan menurunnya kondisi fisik anggota KPPS. *Over time* ini menyebabkan banyaknya korban jiwa yang berjatuhan di Pemilihan Umum 2019 tahun lalu.

Hambatan Pengawasan Badan Pengawas Pemilu terhadap Berjalannya Pemilihan Umum 2019

Hambatan yang dialami pada pemilihan umum serentak 2019 ini lebih kepada akses teknologi di masing-masing daerah yang tidak merata. Hal ini meengakibatkan untuk membutuhkan waktu yang lebih lama karena kurang optimalnya koordinasi serta konsolidasi dalam penyelesaian sengketa antara peserta pemilihan umum. Sedangkan bawaslu serta seluruh perangkat yang terlibat dalam pemilihan umum dituntut untuk melakukan penegakan hukum yang cepat (*speedy process*).

Penutup

Kesimpulan dan Saran

Pada indikator kuantitas, dimana berhubungan dengan pengukuran volume tugas dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh pihak-pihak yang tergabung pada Badan Pengawas. Kuantitas dilihat dari persentase tercapainya atau terlaksananya semua tugas daripada suatu badan pengawas.

Indikator kedua yakni kualitas pengawasan Bawaslu berhubungan erat dengan tingkat kepuasan atau mutu yang dihasilkan daripada kinerja pihak-pihak Bawaslu. Indikator

penentuan kualitas memuat mengenai pelanggaran pada saat pemilu berlangsung dan pertisipasi yang terlibat pada pengawasan pemilu. Efektivitas waktu pada pemilu 2019 berbeda dengan pemilu di tahun-tahun sebelumnya. Pemilu 2019 lebih memakan banyak waktu yaitu sekitar 31 jam dari yang biasanya hanya sekitar 20 jam. Dengan panjangnya waktu pelaksanaan tentu berimbang pada banyaknya tenaga serta biaya operasional pelaksanaan. Dampak daripada kurang efektifnya waktu pada pemilu 2019 menyebabkan penurunan fisik pada anggota-anggota KPPS.

Mengenai penelitian yang telah dipaparkan diatas, Adapun beberapa saran yang dapat diberikan pada penilitian ini adalah sebagai berikut:

Dilakukan penambahan sarana dan prasarana serta kejelasan mengenai anggaran yang ditetapkan, hal ini bertujuan untuk penyusun perencanaan kierja Badan Pengawas Pemilihan Umum dapat berjalan dengan baik.

Bawaslu tetap mempertahankan capaian kinerja dalam Pengawasan Pemilihan Umum bahkan meningkatkan capaian kinerja daripada capaian kinerja pada tahun 2019.

Dapat melakukan pertimbangan mengenai penyederhanaan untuk sistem pemilihan umum khususnya dalam hal perhitungan suara mengingat volume maupun beban kerja yang berat dalam hal pelaksanaa pemilihan umum ini.

Serta diharapkan ada upaya keselamatan dan kesehatan kerja bagi pengawas dan pemilih yang mengalami kecelakaan kerja. Memonitoring penyaluran kotak suara, surat suara maupun komponen yang diperlukan dalam pemilihan umum agar tidak terjadi masalah kekurangan dalam suatu TPS.

Lebih konsisten dalam hal penetapan regulasi pemilihan umum agar tidak merugikan pihak manapun serta dapat lebih efektif dan efisien dalam pelaksanaan pemilihan umum.

Daftar Pustaka

- Hartawati, Sri Indira. 2022. "PENGARUH GAYA KEPEMIMPINAN, PENGAWASAN DAN DISIPLIN KERJA TERHADAP KINERJA PEGAWAI PADA KANTOR KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL KABUPATEN MAJENE." *JURNAL RISET RUMPUN ILMU SOSIAL, POLITIK DAN HUMANIORA* 1 (1): 29–35.
- Hermana, M Arafat, and Dwi Putra Jaya. 2021. "EFEKTIVITAS BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM DALAM PENANGGANAN PELANGGARAN PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019." *AL IMARAH: JURNAL PEMERINTAHAN DAN POLITIK ISLAM* 6 (2): 248–66.
- Jamahari, M Rizky Heryani. 2021. "EFEKTIVITAS MEDIASI DALAM MENYELESAIKAN SENGKETA PROSES PEMILIHAN UMUM (PEMILU) DI BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM (BAWASLU) KABUPATEN LIMA PULUH KOTA PROVINSI SUMATERA BARAT DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILU." *Siyasah: Jurnal Hukum Tata Negara* 4 (1): 1–19.
- Putra, Ferdy Aryona, and Emilda Firdaus. 2015. "Efektifitas Fungsi Pengawasan Panitia Pengawas Pemilu Kota Pekanbaru Dalam Pelaksanaan Pemilu Anggota Dpr, Dpd Dan Dprd Tahun 2014 Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012." Riau University.
- Rama, Muhamad Irfan, and Nartin Nartin. 2020. "KINERJA ORGANISASI PADA KANTOR LURAH AROMBU KECAMATAN UNAAHA KABUPATEN KONAWE." *Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara* 7 (3): 490–500.
- Rohida, Leni. 2018. "Pengaruh Era Revolusi Industri 4.0 Terhadap Kompetensi Sumber Daya Manusia." *Jurnal Manajemen Dan Bisnis Indonesia* 6 (1): 114–36.
- Vigo, Vigo, Baharuddin Baharuddin, and Manuel August Todingbuia. 2021. "Efektivitas Fungsi

Bawaslu Dalam Pelaksanaan Pemilihan Umum Tahun 2019 Di Kabupaten Mamasa Provinsi Sulawesi Barat.” *Paulus Journal of Management Research* 1 (1): 41–48.